



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 158 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5944);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015 - 2019;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 153 Tahun 2009 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Agama;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2010 tentang Program Percepatan melalui Penyelenggaraan Layanan Unggulan di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Tim Reformasi Birokrasi yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Kelompok Kerja dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengarah Reformasi Birokrasi bertugas:

1. memberikan arahan dalam penyusunan dan penyempurnaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2015-2019;
2. mengendalikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2015-2019;
3. melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, konsisten, terarah, dan berkelanjutan.

KETIGA : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi bertugas:

1. merancang rencana tindak lanjut pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada delapan area perubahan;
2. melaksanakan fokus perubahan sesuai dengan rencana yang tertuang dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2015-2019;

3. mengoptimalkan eksistensi area perubahan yang sudah maju dan meningkatkan area perubahan lain yang memerlukan perhatian khusus;
4. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan
5. berkoordinasi dalam merumuskan dan menetapkan Agen Perubahan Kementerian Agama.

KEEMPAT : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi mempunyai kewenangan:

1. mengakses data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. melakukan koordinasi dan konfirmasi intensif kepada satuan organisasi/satuan kerja tingkat pusat, instansi vertikal, dan unit pelaksana teknis yang telah memiliki Tim Reformasi Birokrasi terkait dengan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi disertai dengan data yang dibutuhkan; dan
3. melakukan koordinasi dan konfirmasi intensif kepada satuan organisasi/satuan kerja tingkat pusat, instansi vertikal, dan unit pelaksana teknis yang belum memiliki Tim Reformasi Birokrasi terkait dengan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi disertai dengan data yang dibutuhkan.

KELIMA : Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Birokrasi terdiri dari:

1. Pokja Manajemen Perubahan;
2. Pokja Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
3. Pokja Penguatan Kelembagaan;
4. Pokja Penguatan Tatalaksana;
5. Pokja Sistem Manajemen SDM ASN;
6. Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
7. Pokja Penguatan Sistem Pengawasan; dan
8. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEENAM : Pokja Reformasi Birokrasi bertugas:

1. Pokja Manajemen Perubahan:
 - a. mendorong satuan kerja Kementerian Agama baik pusat maupun daerah untuk membentuk Tim Reformasi Birokrasi;
 - b. menyusun, mengevaluasi, dan menyempurnakan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2015-2019;
 - c. memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Agama;

- d. mendorong terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui pembentukan Agen Perubahan Kementerian Agama; dan
 - e. penyusunan rencana aksi tindak lanjut percepatan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama.
2. Pokja Penguatan Peraturan Perundang-undangan bertugas:
- a. melakukan evaluasi secara berkala terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan;
 - b. menyempurnakan/mengubah/harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain; dan
 - c. melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan.
3. Pokja Penguatan Kelembagaan bertugas:
- a. melakukan evaluasi ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi serta kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain;
 - b. melakukan evaluasi pengukuran jenjang organisasi dan kemungkinan duplikasi fungsi;
 - c. menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok;
 - d. menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan;
 - e. menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, dan restrukturisasi kelembagaan Kementerian Agama;
 - f. melakukan penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
 - g. menyusun peta tugas dan fungsi unit kerja pada kementerian yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*).
4. Pokja Penguatan Tatalaksana bertugas:
- a. melakukan pemetaan proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama;
 - b. melakukan perluasan penerapan dan pengembangan *e-government* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kementerian Agama;

- c. mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada Kementerian Agama; dan
 - d. memberlakukan penerapan sistem kearsipan yang handal di Kementerian Agama.
5. Pokja Sistem Manajemen SDM ASN bertugas:
- a. melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - b. memastikan pelaksanaan penerimaan pegawai secara transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN;
 - c. melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi melalui *assessment* ASN;
 - d. merumuskan kebijakan sistem promosi secara terbuka pada Kementerian Agama;
 - e. merumuskan kebijakan penilaian kinerja pegawai di Kementerian Agama;
 - f. mendorong penerapan penetapan kinerja individu dan kesesuaiannya terhadap kinerja organisasi;
 - g. melakukan penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai dan merumuskan kebijakan *reward and punishment* berbasis kinerja di Kementerian Agama;
 - h. melakukan pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN di Kementerian Agama;
 - i. merumuskan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN di Kementerian Agama;
 - j. merumuskan kebijakan pemanfaatan/pengembangan *database* profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN di Kementerian Agama;
 - k. merumuskan kebijakan pengendalian kualitas diklat di masing-masing K/L dan Pemda;
 - l. menyusun dan menetapkan pola karier pegawai ASN Kementerian Agama;
 - m. melakukan pengukuran *gap competency* antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan; dan
 - n. melakukan penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja
6. Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertugas:
- a. melakukan penguatan akuntabilitas kinerja yang melibatkan Menteri dan pimpinan satuan kerja pada Kementerian Agama; dan
 - b. melakukan pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja; dan
 - c. melakukan peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

7. Pokja Penguatan Sistem Pengawasan bertugas:
 - a. melakukan pengendalian gratifikasi;
 - b. pembangunan SPIP pada unit kerja melalui peningkatan peran APIP;
 - c. penanganan pengaduan masyarakat;
 - d. pelaksanaan *whistleblowing system*;
 - e. pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan; dan
 - f. melakukan pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM.
8. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bertugas:
 - a. menerapkan standar pelayanan pada Kementerian Agama;
 - b. melakukan percepatan pelayanan pada unit pelayanan di Kementerian Agama dalam menciptakan budaya pelayanan prima;
 - c. berkoordinasi dengan instansi/lembaga lain dalam penilaian kepuasan terhadap pelayanan di Kementerian Agama;
 - d. melakukan deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan di Kementerian Agama; dan
 - e. melakukan pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan di Kementerian Agama.

KETUJUH : Untuk kelancaran pelaksanaan reformasi birokrasi pada semua tingkatan organisasi pada Kementerian Agama, masing-masing Unit Eselon I Pusat, instansi vertikal dan unit pelaksana teknis membentuk tim yang melaksanakan seluruh Program Reformasi Birokrasi.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 158 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN AGAMA

TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN AGAMA

A. TIM PENGARAH

| No | Jabatan | Kedudukan Dalam Tim |
|-----|---|---------------------|
| 1. | Menteri Agama | Ketua |
| 2. | Sekretaris Jenderal | Sekretaris |
| 3. | Direktur Jenderal Pendidikan Islam | Anggota |
| 4. | Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah | Anggota |
| 5. | Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam | Anggota |
| 6. | Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen | Anggota |
| 7. | Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik | Anggota |
| 8. | Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu | Anggota |
| 9. | Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha | Anggota |
| 10. | Inspektur Jenderal | Anggota |
| 11. | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan | Anggota |
| 12. | Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal | Anggota |

B. TIM PELAKSANA

| No | Jabatan | Kedudukan Dalam Tim |
|----|---|---------------------|
| 1. | Sekretaris Inspektorat Jenderal | Ketua |
| 2. | Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana | Sekretaris |
| 3. | Kepala Biro Perencanaan | Anggota |
| 4. | Kepala Biro Kepegawaian | Anggota |
| 5. | Kepala Biro Keuangan dan BMN | Anggota |

| No | Jabatan | Kedudukan Dalam Tim |
|-----|---|---------------------|
| 6. | Kepala Biro Hukum dan KLN | Anggota |
| 7. | Kepala Biro Umum | Anggota |
| 8. | Kepala Biro Humas, Data dan Informasi | Anggota |
| 9. | Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama | Anggota |
| 10. | Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam | Anggota |
| 11. | Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah | Anggota |
| 12. | Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah | Anggota |
| 13. | Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam | Anggota |
| 14. | Direktur Pendidikan Agama Islam | Anggota |
| 15. | Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren | Anggota |
| 16. | Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah | Anggota |
| 17. | Direktur Bina Haji | Anggota |
| 18. | Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri | Anggota |
| 19. | Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri | Anggota |
| 20. | Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus | Anggota |
| 21. | Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji | Anggota |
| 22. | Sekretaris Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam | Anggota |
| 23. | Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah | Anggota |
| 24. | Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah | Anggota |
| 25. | Direktur Penerangan Agama Islam | Anggota |
| 26. | Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf | Anggota |
| 27. | Sekretaris Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen | Anggota |
| 28. | Direktur Urusan Agama Kristen | Anggota |
| 29. | Direktur Pendidikan Kristen | Anggota |
| 30. | Sekretaris Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik | Anggota |
| 31. | Direktur Urusan Agama Katolik | Anggota |

| No | Jabatan | Kedudukan Dalam Tim |
|-----|---|---------------------|
| 32. | Direktur Pendidikan Katolik | Anggota |
| 33. | Sekretaris Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu | Anggota |
| 34. | Direktur Urusan Agama Hindu | Anggota |
| 35. | Direktur Pendidikan Hindu | Anggota |
| 36. | Sekretaris Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha | Anggota |
| 37. | Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha | Anggota |
| 38. | Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan | Anggota |
| 39. | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi | Anggota |
| 40. | Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi | Anggota |
| 41. | Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pendidikan dan Keagamaan | Anggota |
| 42. | Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal | Anggota |

C. KELOMPOK KERJA (POKJA) REFORMASI BIROKRASI

1. Pokja Manajemen Perubahan

| No | Nama/Jabatan | Unit Kerja | Kedudukan Dalam Pokja |
|----|--|----------------------|-----------------------|
| 1. | Kepala Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Pelaporan | Biro Ortala Setjen | Ketua |
| 2. | Kabid Penyelenggaraan Diklat Pusdiklat Teknis | Balitbang dan Diklat | Anggota |
| 3. | Kabid Program dan Evaluasi Diklat Pusdiklat Teknis | Balitbang dan Diklat | Anggota |
| 4. | Kepala Subbag Fasilitasi Reformasi Birokrasi | Biro Ortala Setjen | Anggota |
| 5. | Kepala Subbag Evaluasi dan Pelaporan | Biro Ortala Setjen | Anggota |
| 6. | Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum | Ditjen Pendis | Anggota |

| No | Nama/Jabatan | Unit Kerja | Kedudukan Dalam Pokja |
|-----|--|----------------------|-----------------------|
| 7. | Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum | Ditjen PHU | Anggota |
| 8. | Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum | Ditjen Bimas Islam | Anggota |
| 9. | Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum | Ditjen Bimas Kristen | Anggota |
| 10. | Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum | Ditjen Bimas Katolik | Anggota |
| 11. | Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum | Ditjen Bimas Hindu | Anggota |
| 12. | Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum | Ditjen Bimas Buddha | Anggota |
| 13. | Kepala Bagian Perencanaan, Organisasi, dan Hukum | Itjen | Anggota |
| 14. | Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum | Balitbang dan Diklat | Anggota |
| 15. | Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum | BPJPH | Anggota |
| 16. | Ridho Fitrah Hyzkia (Penyusun Laporan) | Biro Ortala Setjen | Anggota |
| 17. | Kristanto (Penyusun naskah rapat pimpinan) | Biro Ortala Setjen | Anggota |

2. Pokja Penguatan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

| No | Nama/Jabatan | Unit Kerja | Kedudukan Dalam Pokja |
|----|--|---------------------------|-----------------------|
| 1. | Kabag Perancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Naskah Perjanjian | Biro Hukum dan KLN Setjen | Anggota |
| 2. | Kabag Perancangan Peraturan dan Keputusan Menteri, dan Dokumentasi | Biro Hukum dan KLN Setjen | Anggota |
| 3. | Kabag Advokasi dan Penyuluhan Hukum | Biro Hukum dan KLN Setjen | Anggota |
| 4. | Kabag Kerja Sama Luar Negeri | Biro Hukum dan KLN Setjen | Anggota |
| 5. | Kasubbag Perancangan UU dan PP | Biro Hukum dan KLN Setjen | Anggota |

| No | Nama/Jabatan | Unit Kerja | Kedudukan Dalam Pokja |
|-----|--|---------------------------|-----------------------|
| 6. | Kasubbag Perancangan Perpres dan Naskah Perjanjian | Biro Hukum dan KLN Setjen | Anggota |
| 7. | Kasubbag Perancangan Peraturan Menteri | Biro Hukum dan KLN Setjen | Anggota |
| 8. | Kasubbag Perancangan Keputusan Menteri | Biro Hukum dan KLN Setjen | Anggota |
| 9. | Kasubbag Advokasi Hukum I | Biro Hukum dan KLN Setjen | Anggota |
| 10. | Kasubbag Advokasi Hukum II | Biro Hukum dan KLN Setjen | Anggota |
| 11. | Kasubbag Kerja Sama Bilateral | Biro Hukum dan KLN Setjen | Anggota |
| 12. | Kasubbag Kerja Sama Regional dan Multilateral | Biro Hukum dan KLN Setjen | Anggota |
| 13. | Kasubbag Tata Usaha | Biro Hukum dan KLN Setjen | Anggota |
| 14. | Kasubbag Hukum | Ditjen Pend. Islam | Anggota |
| 15. | Kasubbag Hukum | Ditjen PHU | Anggota |
| 16. | Kasubbag Hukum | Ditjen Bimas Islam | Anggota |
| 17. | Kasubbag Hukum | Ditjen Bimas Kristen | Anggota |
| 18. | Kasubbag Hukum | Ditjen Bimas Katolik | Anggota |
| 19. | Kasubbag Hukum | Ditjen Bimas Hindu | Anggota |
| 20. | Kasubbag Hukum | Ditjen Bimas Buddha | Anggota |
| 21. | Kasubbag Hukum | Itjen | Anggota |
| 22. | Kasubbag Hukum | Balitbang dan Diklat | Anggota |
| 23. | Kasubbag Hukum | BPJPH | Anggota |
| 24. | Imam Ramdhani (Analisis Produk Hukum) | Biro Hukum dan KLN Setjen | Anggota |
| 25. | A.H.M. Marasabessy (Analisis Produk Hukum) | Biro Hukum dan KLN Setjen | Anggota |

| No | Nama/Jabatan | Unit Kerja | Kedudukan Dalam Pokja |
|-----|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 26. | Abdul Latief (Analisis Produk Hukum) | Biro Hukum dan KLN Setjen | Anggota |

3. Pokja Penguatan Kelembagaan

| No | Jabatan | Unit Kerja | Kedudukan Dalam Pokja |
|-----|--|----------------------|-----------------------|
| 1. | Kabag Organisasi | Biro Ortala Setjen | Ketua |
| 2. | Kabid Penelitian dan Pengembangan Manajemen Organisasi | Balitbang dan Diklat | Anggota |
| 3. | Kasubbag Penataan Organisasi dan Analisis Jabatan I | Biro Ortala Setjen | Anggota |
| 4. | Kasubbag Penataan Organisasi dan Analisis Jabatan II | Biro Ortala Setjen | Anggota |
| 5. | Kasubbag Penataan Organisasi dan Analisis Jabatan III | Biro Ortala Setjen | Anggota |
| 6. | Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana | Ditjen Pend. Islam | Anggota |
| 7. | Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana | Ditjen PHU | Anggota |
| 8. | Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana | Ditjen Bimas Islam | Anggota |
| 9. | Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana | Ditjen Bimas Kristen | Anggota |
| 10. | Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana | Ditjen Bimas Katolik | Anggota |
| 11. | Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana | Ditjen Bimas Hindu | Anggota |
| 12. | Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana | Ditjen Bimas Buddha | Anggota |
| 13. | Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana | Itjen | Anggota |
| 14. | Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana | Balitbang dan Diklat | Anggota |
| 15. | Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana | BPJPH | Anggota |
| 16. | Rijal Roihan (Analisis Organisasi) | Biro Ortala Setjen | Anggota |
| 17. | Hasyim Khumaedi (Analisis Jabatan) | Biro Ortala Setjen | Anggota |

| No | Jabatan | Unit Kerja | Kedudukan Dalam Pokja |
|-----|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 18. | Hatta Aulia (Analisis Organisasi) | Biro Ortala Setjen | Anggota |

4. Pokja Penguatan Tatalaksana

| No | Jabatan | Unit Kerja | Kedudukan Dalam Pokja |
|-----|--|--|-----------------------|
| 1. | Kepala Bagian Tata Laksana | Biro Ortala Setjen | Ketua |
| 2. | Kabag Teknologi dan Sistem Informasi | Biro Humas, Data, dan Informasi Setjen | Anggota |
| 3. | Kabag Data, Sistem Informasi, dan Humas | Ditjen Pend. Islam | Anggota |
| 4. | Kabag Perencanaan dan Humas | Ditjen PHU | Anggota |
| 5. | Kabag Data, Sistem Informasi, dan Humas | Ditjen Bimas Islam | Anggota |
| 6. | Kabag Perencanaan dan Sistem Informasi | Ditjen Bimas Kristen | Anggota |
| 7. | Kabag Perencanaan dan Sistem Informasi | Ditjen Bimas Katolik | Anggota |
| 8. | Kabag Perencanaan dan Sistem Informasi | Ditjen Bimas Hindu | Anggota |
| 9. | Kabag Perencanaan dan Sistem Informasi | Ditjen Bimas Buddha | Anggota |
| 10. | Kabag Pengelolaan Hasil Pengawasan, Sistem Informasi, dan Pengaduan Masyarakat | Itjen | Anggota |
| 11. | Kabag Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi | Balitbang dan Diklat | Anggota |
| 12. | Kabag Perencanaan dan Sistem Informasi | BPJPH | Anggota |
| 13. | Kasubbag Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi | Biro Humas, Data, dan Informasi Setjen | Anggota |
| 14. | Kasubbag Tata Usaha | Biro Humas, Data, dan Informasi Setjen | Anggota |
| 15. | Kisman Supriyatna (Penyusun Standar dan Sistem Prosedur Kerja) | Biro Ortala Setjen | Anggota |
| 16. | Idris Rahardja (Penyusun Standar Pelayanan) | Biro Ortala Setjen | Anggota |

5. Pokja Sistem Manajemen SDM ASN

| No | Jabatan | Unit Kerja | Kedudukan Dalam Pokja |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|
| 1. | Kabag Pengadaan dan Pertimbangan Pegawai | Biro Kepegawaian Setjen | Ketua |
| 2. | Kabag Asesmen dan Bina Pegawai | Biro Kepegawaian Setjen | Anggota |
| 3. | Kabag Data, Informasi dan Naskah Kepegawaian | Biro Kepegawaian Setjen | Anggota |
| 4. | Kabag Organisasi | Biro Ortala Setjen | Anggota |
| 5. | Kasubbag Penataan Organisasi dan Analisis Jabatan I | Biro Ortala Setjen | Anggota |
| 6. | Kasubbag Penataan Organisasi dan Analisis Jabatan II | Biro Ortala Setjen | Anggota |
| 7. | Kasubbag Penataan Organisasi dan Analisis Jabatan II | Biro Ortala Setjen | Anggota |
| 8. | Kasubbag Sistem dan Layanan Kepegawaian | Biro Kepegawaian Setjen | Anggota |
| 9. | Kasubbag Pengadaan Pegawai | Biro Kepegawaian Setjen | Anggota |
| 9. | Kasubbag Pertimbangan Kepegawaian | Biro Kepegawaian Setjen | Anggota |
| 10. | Kasubbag Asesmen Pegawai | Biro Kepegawaian Setjen | Anggota |
| 11. | Kasubbag Bina Karir Pegawai | Biro Kepegawaian Setjen | Anggota |
| 13. | Kasubbag Tata Usaha | Biro Kepegawaian Setjen | Anggota |
| 14. | Kasubbag Kepegawaian | Ditjen Pend. Islam | Anggota |
| 15. | Kasubbag Kepegawaian | Ditjen PHU | Anggota |
| 16. | Kasubbag Kepegawaian | Ditjen Bimas Islam | Anggota |
| 17. | Kasubbag Kepegawaian | Ditjen Bimas Kristen | Anggota |
| 18. | Kasubbag Kepegawaian | Ditjen Bimas Katolik | Anggota |
| 19. | Kasubbag Kepegawaian | Ditjen Bimas Hindu | Anggota |
| 20. | Kasubbag Kepegawaian | Ditjen Bimas Buddha | Anggota |
| 21. | Kasubbag Kepegawaian | Itjen | Anggota |
| 22. | Kasubbag Kepegawaian | Balitbang dan Diklat | Anggota |
| 23. | Kasubbag Kepegawaian | BPJPH | Anggota |

| No | Jabatan | Unit Kerja | Kedudukan Dalam Pokja |
|-----|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 24. | Hilal Sirrika Kholid (Arsiparis Muda) | Biro Kepegawaian Setjen | Anggota |
| 25. | Aulia Muttaqin (Analisis Kompetensi) | Biro Kepegawaian Setjen | Anggota |

6. Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja

| No | Jabatan | Unit Kerja | Kedudukan Dalam Pokja |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|
| 1. | Kabag Evaluasi Kinerja Organisasi dan Fasilitasi Penyelesaian Hasil Pengawasan | Biro Ortala Setjen | Ketua |
| 2. | Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum | Ditjen Pendis | Anggota |
| 3. | Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum | Ditjen PHU | Anggota |
| 4. | Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum | Ditjen Bimas Islam | Anggota |
| 5. | Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum | Ditjen Bimas Kristen | Anggota |
| 6. | Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum | Ditjen Bimas Katolik | Anggota |
| 7. | Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum | Ditjen Bimas Hindu | Anggota |
| 8. | Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum | Ditjen Bimas Buddha | Anggota |
| 9. | Kepala Bagian Perencanaan, Organisasi, dan Hukum | Itjen | Anggota |
| 10. | Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum | Balitbang dan Diklat | Anggota |
| 11. | Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum | BPJPH | Anggota |
| 12. | Kabag Data Perencanaan dan Kerjasama Dalam Negeri | Biro Perencanaan Setjen | Anggota |
| 13. | Kabid Penelitian dan Pengembangan Bimas Agama, Kerukunan, dan Aliran Keagamaan | Balitbang dan Diklat | Anggota |
| 14. | Kabid Penelitian dan Pengembangan Haji, Umrah, dan Produk Halal | Balitbang dan Diklat | Anggota |

| No | Jabatan | Unit Kerja | Kedudukan Dalam Pokja |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|
| 15. | Kabid Penelitian dan Pengembangan Pendidikan RA dan Madrasah | Balitbang dan Diklat | Anggota |
| 16. | Kabid Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Pendidikan Tinggi Keagamaan | Balitbang dan Diklat | Anggota |
| 17. | Kabid Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Keagamaan | Balitbang dan Diklat | Anggota |
| 18. | Kasubbag Pengolahan Data Perencanaan | Biro Perencanaan Setjen | Anggota |
| 19. | Kasubbag Evaluasi Kinerja Organisasi | Biro Ortala Setjen | Anggota |
| 20. | Listyoati (Pengadministrasi) | Biro Ortala Setjen | Anggota |
| 21. | Farid Ristafana (Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja) | Biro Ortala Setjen | Anggota |

7. Pokja Penguatan Sistem Pengawasan

| No | Jabatan | Unit Kerja | Kedudukan Dalam Pokja |
|----|--|----------------------|-----------------------|
| 1. | Kabag PHP, SIP, dan Dumas | Itjen | Ketua |
| 2. | Kepala Bagian Perencanaan, Organisasi, dan Hukum | Itjen | Anggota |
| 3. | Kabag Evaluasi Kinerja Organisasi dan Fasilitasi Penyelesaian Hasil Pengawasan | Biro Ortala Setjen | Anggota |
| 4. | Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum | Ditjen Pendis | Anggota |
| 5. | Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum | Ditjen PHU | Anggota |
| 6. | Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum | Ditjen Bimas Islam | Anggota |
| 7. | Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum | Ditjen Bimas Kristen | Anggota |
| 8. | Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum | Ditjen Bimas Katolik | Anggota |
| 9. | Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum | Ditjen Bimas Hindu | Anggota |

| No | Jabatan | Unit Kerja | Kedudukan Dalam Pokja |
|-----|---|----------------------|-----------------------|
| 10. | Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum | Ditjen Bimas Buddha | Anggota |
| 11. | Kepala Bagian Perencanaan, Organisasi, dan Hukum | Itjen | Anggota |
| 12. | Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum | Balitbang dan Diklat | Anggota |
| 13. | Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum | BPJPH | Anggota |
| 14. | Kasubbag PHP, Dumas dan SIP | Itjen | Anggota |
| 15. | Kasubbag TLHP Internal | Biro Ortala Setjen | Anggota |
| 16. | Kasubbag TLHP Eksternal | Biro Ortala Setjen | Anggota |
| 17. | Kasubbag Ortala | Itjen | Anggota |
| 18. | Dian Andriady (Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja) | Itjen | Anggota |
| 19. | Arief Aditya Arman (Pengolah Bahan Laporan Hasil Audit) | Itjen | Anggota |
| 20. | M. Reza (Pengadministrasi) | Biro Ortala Setjen | Anggota |
| 21. | Abdul Kholil (Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja) | Biro Ortala Setjen | Anggota |

8. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

| No | Jabatan | Unit Kerja | Kedudukan Dalam Pokja |
|----|---|----------------------|-----------------------|
| 1. | Kabag Tata Laksana | Biro Ortala Setjen | Ketua |
| 2. | Kabag PHP, SIP, dan Dumas | Itjen | Anggota |
| 3. | Kasubbag Pelayanan Publik | Biro Ortala Setjen | Anggota |
| 4. | Kasubbag Dumas, dan SIP | Itjen | Anggota |
| 5. | Kasubbag Penyelesaian Administrasi Hasil Pengawasan Eksternal | Biro Ortala Setjen | Anggota |
| 6. | Kasubbag Ortala | Ditjen Pendis | Anggota |
| 7. | Kasubbag Ortala | Ditjen PHU | Anggota |
| 8. | Kasubbag Ortala | Ditjen Bimas Islam | Anggota |
| 9. | Kasubbag Ortala | Ditjen Bimas Kristen | Anggota |

| No | Jabatan | Unit Kerja | Kedudukan Dalam Pokja |
|-----|--|----------------------|-----------------------|
| 10. | Kasubbag Ortala | Ditjen Bimas Katolik | Anggota |
| 11. | Kasubbag Ortala | Ditjen Bimas Hindu | Anggota |
| 12. | Kasubbag Ortala | Ditjen Bimas Buddha | Anggota |
| 13. | Kasubbag Ortala | Itjen | Anggota |
| 14. | Kasubbag Ortala | Balitbang dan Diklat | Anggota |
| 15. | Kasubbag Ortala | BPJPH | Anggota |
| 16. | Kabid Pentashihan | Balitbang dan Diklat | Anggota |
| 17. | Kabid Museum Bayt | Balitbang dan Diklat | Anggota |
| 18. | Kabid Lektor Keagamaan | Balitbang dan Diklat | Anggota |
| 19. | Shelvy Nabashah (Penyusun Standar dan Sistem Prosedur Kerja) | Biro Ortala Setjen | Anggota |
| 20. | Puji Astuti (Penyusun Standar Pelayanan) | Biro Ortala Setjen | Anggota |

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN